

***DETERMINATION OF STANDARD UNIT PRICES FOR ELECTRONIC GOODS
AS A CONTROL OF REGIONAL EXPENDITURE BUDGET AT THE BANGGAI
DISTRICT BPKAD OFFICE***

**PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG ELEKTRONIK
SEBAGAI PENGENDALI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA KANTOR
BPKAD KABUPATEN BANGGAI**

Ririn Apriana M. Nur^{1*}, Frety Maong²

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Luwuk^{1,2}

ririnaprianamur@gmail.com^{1*}, frety864@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism for determining standard unit prices (SSH) of electronic goods as a budget control instrument in regional expenditure at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Banggai Regency. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that SSH is determined based on market price surveys, including value-added tax (VAT), supplier profit margins, and inflation, and is integrated into the SIPD system to ensure budget consistency. However, discrepancies between SSH and actual market prices were identified, both higher and lower, potentially leading to budget inefficiencies and procurement constraints. Although SSH serves as a tool to control budget allocation by limiting unit prices, its effectiveness is hindered by inadequate data updates and suboptimal control functions. Therefore, periodic data updates, expansion of price data sources, and stronger coordination among BPKAD, regional work units (OPD), and suppliers are recommended. In conclusion, optimizing SSH implementation can enhance efficiency and accountability in regional budget management.

Keywords: Standard Unit Prices; Budget Control; Electronic Goods; BPKAD; Banggai Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan Standar Satuan Harga (SSH) barang elektronik sebagai instrumen pengendalian anggaran belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan SSH dilakukan berdasarkan survei harga pasar dengan mempertimbangkan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin keuntungan penyedia, dan inflasi, serta terintegrasi dalam sistem SIPD untuk menjaga konsistensi penganggaran. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara SSH dan harga pasar aktual, baik lebih tinggi maupun lebih rendah, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan kendala dalam proses pengadaan. Meskipun SSH berfungsi sebagai alat pengendalian dengan membatasi harga satuan yang dianggarkan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan pembaruan data dan belum optimalnya fungsi pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data secara berkala, perluasan sumber data harga, serta penguatan koordinasi antara BPKAD, OPD, dan penyedia. Dengan demikian, optimalisasi penerapan SSH dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.

Kata Kunci: Standar Satuan Harga (SSH); Pengendalian Anggaran; Barang Elektronik; BPKAD; Kabupaten Banggai.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Manalu et al., 2018). Dalam pelaksanaannya, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

sebagai dasar dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan (Widianingrum et al., 2017).

Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan anggaran daerah adalah Standar Satuan Harga (SSH), yang berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan dan pengendalian belanja pemerintah daerah agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Winansi, 2025). SSH ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang bertujuan menyeragamkan harga barang dan jasa serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (Amanda & Henny, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara harga dalam SSH dengan harga pasar aktual, penggunaan data lama, serta kurangnya evaluasi berkala yang berdampak pada ketidakefisienan dan hambatan dalam proses pengadaan (Utami, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan data yang tidak mutakhir dalam penyusunan SSH dapat menyebabkan perbedaan harga yang signifikan dengan kondisi di lapangan, seperti yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo (Utami, 2021). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan SSH yang disusun dengan mempertimbangkan faktor harga tertinggi, keuntungan pihak ketiga, dan inflasi dapat menghasilkan anggaran yang lebih akurat (Dai et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan (gap) antara teori dan praktik dalam penetapan SSH, khususnya terkait akurasi dan relevansi data yang digunakan.

Di Kabupaten Banggai, permasalahan serupa juga ditemukan, terutama pada pengadaan barang elektronik seperti laptop, printer, dan scanner yang memiliki harga fluktuatif dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ketidaksesuaian antara harga dalam SSH dengan harga pasar aktual dapat menimbulkan pemborosan anggaran maupun hambatan dalam pengadaan barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan SSH yang akurat dan transparan menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menganalisis mekanisme penetapan SSH untuk barang elektronik dalam konteks pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Banggai, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penetapan Standar Satuan Harga (SSH) serta menilai perannya sebagai alat pengendali anggaran agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Teori anggaran menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran serta berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam organisasi (Bastian, 2018). Anggaran juga dipandang sebagai estimasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya (Ferdinan et al., 2020). Dalam konteks pemerintah daerah, anggaran memiliki peran penting sebagai instrumen dalam mengatur pelaksanaan

belanja daerah agar berjalan secara efektif dan efisien.

Selain itu, teori biaya standar (*standard cost theory*) digunakan untuk menjelaskan konsep penetapan biaya yang telah ditentukan sebelumnya sebagai tolok ukur dalam pengendalian biaya. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu aktivitas atau produk dalam kondisi tertentu dan digunakan sebagai pembandingan terhadap biaya aktual melalui analisis selisih (*variance analysis*) (Manalu et al., 2018). Penerapan biaya standar memungkinkan organisasi untuk mengendalikan pengeluaran, mengevaluasi kinerja, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (Hasibuan et al., 2024). Dalam penelitian ini, teori biaya standar menjadi dasar dalam memahami penetapan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai bentuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya dalam proses penganggaran.

Konsep Standar Satuan Harga (SSH) merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran belanja. SSH didefinisikan sebagai standar harga satuan barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pemerintah daerah (Dai et al., 2023). Penetapan SSH diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menegaskan bahwa SSH merupakan harga tertinggi yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah. SSH berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian anggaran untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, SSH juga berperan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan meminimalkan potensi pemborosan dan

ketidakefisienan dalam pengeluaran daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SSH masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian (Utami, 2021) menemukan bahwa penggunaan data yang tidak mutakhir dalam penyusunan SSH menyebabkan ketidaksesuaian antara harga standar dengan harga pasar, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Dai et al., 2023) menunjukkan bahwa perhitungan SSH yang mempertimbangkan faktor harga tertinggi, keuntungan pihak ketiga, dan inflasi dapat menghasilkan anggaran yang lebih akurat dan relevan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa akurasi data dan mekanisme penyusunan SSH sangat menentukan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa Standar Satuan Harga (SSH) memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian anggaran. Namun, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan, khususnya terkait akurasi penetapan harga dan kesesuaiannya dengan kondisi pasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme penetapan SSH, khususnya pada barang elektronik, serta menilai perannya dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penetapan standar satuan harga barang sebagai bentuk pengendalian anggaran belanja daerah, khususnya pada pengadaan barang

elektronik seperti laptop, printer dan scanner di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada paradigma post-positivisme dan digunakan untuk menelaah fenomena dalam kondisi alamiah, bukan dalam situasi eksperimen. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan memadukan berbagai metode untuk memperoleh data yang lebih valid. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara induktif kualitatif, dimana peneliti menafsirkan data untuk menemukan makna yang mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman dan interpretasi fenomena dibandingkan dengan generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April – Mei 2025. Subjek penelitian adalah individu-individu yang menjadi sumber informasi dalam rangka memberikan data yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut informan, yaitu orang yang memberikan data yang relevan dan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan dan implementasi standar satuan harga, 1 orang staf keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan

anggaran daerah dan 3 orang selaku penyedia barang/jasa pengadaan berbasis standar satuan harga. Teknik analisis deskriptif diterapkan melalui tiga langkah, yaitu :

Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari teman dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali apabila diperlukan.

Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara deskriptif baik dalam bentuk teks maupun gambar-gambar untuk melengkapi hasil sajian data. Dengan demikian hasil sajian dapat mudah dipahami.

Verifikasi Data

Setelah penyajian data, maka langkah terakhir adalah verifikasi data. Setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan masalah pokok penelitian, selanjutnya data dianalisis dan diperiksa keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil ini diawali dengan proses penetapan standar satuan harga barang elektronik seperti laptop, printer dan scanner dilakukan melalui tahapan pengumpulan data harga pasar melalui survei ketiga toko berbeda di wilayah Kabupaten Banggai, penetapan harga tinggi sebagai acuan harga, penambahan

komponen dalam perhitungan, kemudian diverifikasi dan finalisasi oleh tim teknis BPKAD serta penerbitan SK bupati sebagai dokumen resmi Standar Harga barang (SSH) 2024. Hal ini menunjukkan bahwa SSH tidak hanya berfungsi sebagai pedoman harga, tetapi juga sebagai alat kontrol sistemik dalam penyusunan dan pengendalian anggaran. Dalam proses penetapan Standar Harga Satuan (SSH) tahun 2024, ditemukan variasi antara harga yang ditetapkan pemerintah daerah melalui dokumen SSH dengan harga pasar aktual di

wilayah Kabupaten Banggai. Berdasarkan data survei harga pasar dan wawancara dengan informan dari BPKAD, OPD, dan penyedia barang, diketahui bahwa harga pasar untuk barang elektronik ada yang lebih tinggi, lebih rendah, maupun sama dengan harga dalam SSH. Kondisi ini memunculkan sejumlah kendala dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah. Berikut ini tabel perbandingan SSH dengan harga pasar :

Tabel 1. Perbedaan SSH Komputer dengan harga Pasar

No	Nama Barang	Harga SSH (Rp)	Harga Pasar (Rp)	Selisih Harga (Rp)
1	ACER Aspire 5 Slim A514-54-56MU	13.203.000	11.205.000	1.998.000
2	ACER Aspire Vero AV15-51R-59GN	14.983.650	14.995.000	(11.350)
3	ACER Swift 3 OLED SF314-71-70Y2	22.273.650	22.000.000	273.650
4	Dynabook Portege X30W	44.316.045	44.316.045	0
5	Dynabook Portege X40-J	44.750.745	44.750.000	745
6	Toshiba TECRA A40D129	10.528.650	10.528.650	0
7	Asus Zenbook Pro Duo UX8402ZA OLED Touch	36.988.650	37.999.000	(1.010.350)
8	ASUS ROG STRIX SCAR 15 G533ZX i9	79.918.650	79.999.000	(80.350)
9	ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE G733CX i9	83.698.650	80.000.000	3.698.650
10	Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX R9MRT	103.935.151	103.935.151	0
11	Apple MacBook Air M2 2022 Chip	27.570.902	20.999.000	6.571.902
12	APPLE MacBook Pro 14 inch	53.819.100	55.999.000	(2.179.900)

Tabel 2. Perbedaan SSH Printer Dengan Harga Pasar

No	Nama Barang	Harga SSH (Rp)	Harga Pasar (Rp)	Selisih (Rp)
1	BROTHER Printer Mono Laser HL-L2365DW	3.354.750	3.500.000	145.250
2	BROTHER Printer DCP-L5600DN	12.901.950	11.290.000	1.611.950
3	BROTHER Printer Mono Laser Multifunction DCP-L2540DW	4.359.825	4.360.000	175
4	BROTHER Printer Mono Laser HL-L2365DW	3.099.000	3.628.250	529.250
5	Printer Canon GM4070	4.725.000	4.725.000	0
6	CANON Pixma G3010	3.510.000	3.510.000	0
7	CANON Printer LBP8100N	19.036.425	19.036.425	0
8	CANON Printer LBP8780x	34.308.900	29.820.000	4.488.900
9	Printer Epson L1800 Photo Ink Tank A3+ 6 Color	17.300.000	22.114.390	4.814.390
10	EPSON L6270 – Discontinue	7.500.000	7.320.000	180.000
11	EPSON L6270	7.500.000	7.560.000	60.000
12	EPSON Printer LX-310	6.750.000	6.750.000	0

13	EPSON Printer DLQ-3500	16.449.750	16.049.899	399.851
14	HP OfficeJet 200 Mobile Printer CZ993A	5.065.200	5.050.000	15.200
15	HP Ink Tank 115 Printer	2.515.050	2.515.050	0
16	HP Color LaserJet Ent MFP M480f Printer	21.936.150	22.236.000	299.850
17	Printer HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw	28.434.038	20.260.000	8.174.038

Tabel 3. Perbedaan SSH Scanner dengan harga Pasar

No	Nama Barang	Harga SSH (Rp)	Harga Pasar (Rp)	Selisih Harga (Rp)
1	FUJITSU ScanSnap SV600	18.541.400	18.300.000	241.400
2	FUJITSU ScanSnap Ix1600	16.335.000	15.454.000	881.000
3	SCANNER CANON LIDE 300	1.648.350	1.600.000	48.350
4	EPSON ES 60W	3.746.925	3.750.000	(3.075)
5	Scanner Canon DR M160II	17.915.500	17.950.000	(34.500)
6	Scanner Epson DS-1630 ADF + Flatbed	12.073.050	12.000.000	73.050
7	EPSON WorkForce DS-410	8.328.150	8.350.000	(21.850)
8	PLUSTEK SmartOffice PNN0204	8.910.100	8.910.100	0

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Banggai yang diperoleh dari analisis data wawancara, penetapan Standar Satuan Harga dalam pengendalian anggaran belanja daerah dengan mengaitkan temuan-temuan di lapangan dengan teori-teori yang relevan, hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan SSH Tahun 2024 di Kabupaten Banggai dilakukan dengan mengacu pada beberapa komponen harga, antara lain hasil survei pasar, e-katalog, penambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, margin keuntungan rekanan 15%, dan asumsi inflasi sebesar 4%. Komponen ini digunakan oleh tim teknis dari BPKAD bersama dengan perangkat

daerah terkait untuk menyusun harga satuan yang realistis dan terstandar. Hal ini sejalan dengan prinsip biaya standar, yaitu penetapan harga berdasarkan taksiran biaya normal yang digunakan dalam kondisi efisien dan wajar.

Dalam prosesnya, hasil wawancara mengindikasikan bahwa perangkat daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga di luar SSH, karena sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) telah mengunci penggunaan harga berdasarkan SSH yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Dengan demikian, SSH tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol dalam proses penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah.

Namun demikian, hasil temuan juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan biaya standar melalui SSH, terutama apabila harga yang ditetapkan tidak mengikuti dinamika harga pasar terkini. Beberapa informan menyatakan bahwa keterlambatan pembaruan harga atau kurangnya akurasi survei pasar dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara SSH dan harga riil, yang pada akhirnya menghambat proses pengadaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara sistem penetapan SSH telah mengikuti prinsip biaya standar, implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui validasi data yang lebih komprehensif dan pembaruan yang lebih rutin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SSH di Kabupaten Banggai telah diterapkan sebagai bentuk biaya standar dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan metode penetapan, keakuratan data harga pasar, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan hasil perbandingan antara harga dalam dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2024 dengan harga pasar aktual, ditemukan tiga pola perbedaan harga yang mencerminkan sejauh mana SSH sesuai dengan kondisi riil di lapangan yaitu SSH lebih Tinggi dari Harga Pasar, SSH lebih rendah dari harga pasar dan SSH sama dengan harga pasar. Secara umum, perbandingan ini memperkuat pentingnya evaluasi rutin terhadap SSH untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi harga pasar aktual dan mampu menjadi alat pengendali anggaran yang tepat sasaran. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan biaya standar dalam SSH belum sepenuhnya akurat, baik dari sisi efisiensi maupun efektivitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SSH di Kabupaten Banggai telah dimanfaatkan sebagai instrumen pengendali anggaran secara sistem dan prosedur. Namun, efektivitas pengendalian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan mekanisme penetapan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan kebutuhan riil perangkat daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penetapan Standar Satuan Harga (SSH) di Kabupaten Banggai telah dilaksanakan secara sistematis melalui keterlibatan BPKAD dan OPD dengan mengacu pada berbagai komponen penentu harga serta penggunaan sistem SIPD sebagai acuan penganggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber data, keterlambatan pembaruan, dan koordinasi antar pihak yang belum optimal sehingga memengaruhi akurasi penetapan harga. SSH pada dasarnya telah berfungsi sebagai instrumen pengendalian anggaran karena membatasi ruang mark-up dan meningkatkan akuntabilitas belanja, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya perbedaan antara harga SSH dan harga pasar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran SSH sebagai alat pengendali anggaran masih memerlukan penguatan melalui evaluasi dan pembaruan secara berkala dengan dukungan data yang lebih akurat dan komprehensif. Dengan demikian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas data harga, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta melakukan pembaruan SSH secara rutin guna meminimalkan potensi pemborosan dan hambatan dalam pengadaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek dan ketersediaan data, sehingga hasilnya

perlu diinterpretasikan secara hati-hati, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan serta menggunakan pendekatan yang lebih mendalam untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian berlangsung. Kita juga berterimakasih kepada institusi yang telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, R., & Henny, D. (2022). *Analisis Penerapan Standar Harga Satuan Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)*. 2(2), 1629–1640.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14934>
- Bastian, I. (2018). *Audit sektor publik: pemeriksaan pertanggungjawaban pemerintah*. Salemba Empat.
[https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1239773&pType=Author&pLembarkerja=1&pLokasi=1&pPilihan=default&pDataItem=Indra Bastian%2C 1965- \(penulis\)](https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1239773&pType=Author&pLembarkerja=1&pLokasi=1&pPilihan=default&pDataItem=Indra Bastian%2C 1965- (penulis))
- Dai, Y. R., Boku, Z., & Mahmud, M. (2023). Analisis Standar Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek (Studi Kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2.1).
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3783190>
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134.
<https://doi.org/10.29259/JMBT.V17I2.11844>
- Hasibuan, A. N., Fauziyah, H., Sitorus, I. R., Fauzi, A., Prastia, G. A., Novianto, I., & Thoriqin, A. (2024). Analisis Biaya Standar Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi Pada UMKM. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 137–149.
<https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.24>
- Manalu, R. G. M., Heriyanto, M., & Farida, L. (2018). Standar Belanja (ASB) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek Dan Pelatihan. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1).
<https://doi.org/10.46730/jiana.v16i1.6152>
- Utami, S. E. (2021). *Analisis Penetapan Harga Satuan dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)*. 1(April 2020), 2020–2022.
- Widyaningrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/778807>
- Winansi, V. (2025). Analisis tata kelola keuangan kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten sikka berdasarkan perspektif good governance. *Jurnal Accounting UNIPA*, 4(September), 27–46.